

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ruslan. 2021. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin. Makassar.
- A. Rosyid Al Atok. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Setara Press. Malang.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jimly Assididqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. Konstitusi Pers. Jakarta.
- , 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 2014. *Perihal Undang-Undang*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- , 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maria Farida Indrati, S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. PT Kanisius. Yogyakarta.
- Ni'matul Huda. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. UII Press. Yogyakarta.

Saldi Isra. 2013. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Saldi Isra. 2020. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Zainal Arifin Mochtar. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. EA Books. Yogyakarta.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

### **Artikel Jurnal**

Anita Nuraeni Putri. Pertanggungjawaban Fungsi Representasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. *Jurnal Jentera*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017.

Arini Nur Annisa, *et al.* *Government Supervision of The Rights Fulfillment of Housed Workers in The Transition Period*. *Awang Long Law Review*, Vol. 5, No. 1. Tahun 2022.

Helmi Chandra SY. Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4. Tahun 2022.

Jack M. Beermann, Willian P. Marshall. *The Constitutional Law of Presidential Transitions*. Retrieved from 84 *N.C.L. Rev.* 1253: *The Constitutional Law of Presidential Transitions* (unc.edu). 2006.

Jeffery A. Jenkins, Timothy P. Nokken. *Legislative Shirking in the Pre-Twentieth Amendment Era: Presidential Influence, Party Power, and Lame-Duck Sessions of Congress, 1877–1933*. *Studies in American Political Development*, Vol. 22, Issue 1. 2008.

Muhammad Faqih. Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). *Jurnal Mimbar Yustitia*, Vol. 3, No. 2. Tahun 2019.

Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, Fitriani Ahlan Sjarif. Politik Hukum *Carry Over* Rancangan Undang-Undang dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1. Tahun 2022.

Nuryadin. Urgensi Pengaturan *Lame Duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 9, No. 6. Tahun 2022.

Stefanus Hendrianto. *Indonesia's Constitutional Conundrum: The Weak Presidency, the Strong Opposition and the Regional Elections Law*. 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.

### Artikel Internet

Anonim. "DPR Periode 2009-2014, Hanya Setujui 126 RUU Jadi Undang-Undang." *Hukumonline.com*, 30 September 2014.

Azeem Marhendra Amedi. "'Lame Duck', Isu yang Tertinggal dari Diskursus Pemilu." *Kompas.id*, 18 Oktober 2021.

Congressional Research Service. "Lame Duck Sessions of Congress, 1935-2018 (74th-115th Congresses)." *Congress.gov*. 2020.

DPR RI. "RUU yang Disahkan Pasca Pemilu 2014." *Dpr.go.id*, 2023.

DPR RI. "RUU yang Disahkan Pasca Pemilu 2019." *Dpr.go.id*, 2023.

Fitrah Arsil. "RUU Kontroversi di Masa Transisi." *Hukum Tata Negara UI*. 18 September 2019.

Fitria Chusna. "Anggota DPR Terpilih Terdiri dari 50,26 Persen "Wajah Lama", 80,52 Persen Laki-Laki." *Kompas.com*. 2019.

Muhammad Ridwan. "Kaleidoskop 2019: Demo Tolak Revisi UU KPK Timbulkan Korban Jiwa." *JawaPos.com*, 25 Desember 2019.

Sabrina Asril. "Batalkan Pilkada Tak Langsung, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu!" *Kompas.com*, 2 Oktober 2014.

Sahran Raden. "Kompleksitas Pemilu 2024 dan Kedudukan Hukum (*Rechtspositie*) Komisi Pemilihan Umum dalam Menetapkan Jadwal Pemilu 2024." *Sulteng.kpu.go.id*, 2023.